

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alyusi, S. D. (2019). *Media sosial: Interaksi, identitas dan modal sosial*. Prenada Media.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (cet. V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta: Kencana
- Busro, M. (2018). *Teori-teori manajemen sumber daya manusia*. Prenada Media.
- Faiz, P. M. (2009). *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*. Buku Konstitusi.
- Christianto, H. (2017). *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Suluh Media.
- Freud, S. (2024). *Psikopatologi dalam kehidupan sehari-hari*. Retrieved from <https://dede.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/02/psikopatologi-dalam-kehidupan-sehari-hari-sigmund-freud-z-library.pdf>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Is, M. S., & SHI, M. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Malang, (2007).
- Khasanah, D. D., Iftitah, A., Abas, M., Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin, Q., & Rohmah, A. N. (2023). *Hukum perdata*. Sada Kurnia Pustaka
- Maesaroh, S. (2018). *Operasi Kelamin Transeksual*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta

- Mawanah, Elfi. (2009). *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Teras.
- Manullang, E. F. M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Prasetyo, T. (2019). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: *Thafa Media*.
- Rasji, R. (2023). *Pengujian peraturan kebijakan di Indonesia: Problematika, praktik, dan bangunan hukum*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Sarastia, R. B. (2024). *Analisis hukum beserta dampaknya pada perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/PN.SMG* [Tesis Magister, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman]. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
- Sinaga, D. (2018). *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia
- Suyanto, S.H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Soeroso, R. (2021). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Sugiarto, E. (2013). *Master EYD edisi baru*. Group Khitah Publishing.
- Untara, W. (2010). *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Indonesia Tera

## B. Jurnal dan Skripsi

- Abdurrachman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). Disparitas putusan hakim dalam kasus narkoba. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).
- Acemoglu, D., & Wolitzky, A. (2021). A theory of equality before the law. *The Economic Journal*, 131(636), 1429–1465.  
<https://doi.org/10.1093/ej/ueaa106>
- Adisel, A., & Thadi, R. (2020). Sistem informasi manajemen organisasi: Perannya dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. *Journal of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(2), 145–153.
- Aditya, A. (2016). *Proses Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Menangani Perkara Permohonan Perubahan Jenis Kelamin (Putusan pengadilan negeri Kendal Nomor: 1412/Pdt. P/2012/Pn. Kdl)* (Doctoral dissertation, UII).
- Adhita, M. M. (2023). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Adlhiyati, Z., & Achmad, A. (2019). Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 409-431.
- Agustin, S. D., Rusli, B., & Syuryani, S. (2023). Akibat hukum terhadap perubahan data diri seorang transeksual. *Sakato Law Journal*, 1(1), 27–34.
- Al Amin, M. N. K., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15-36.

- Alwino, A. (2016). Diskursus mengenai keadilan sosial: Kajian teori keadilan dalam liberalisme Locke, persamaan Marx, dan 'Justice as Fairness' Rawls. *Melintas: An International Journal of Philosophy and Religion*, 32(3), 309–328.
- Amania, N. (2019). Analisis yuridis putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan relevansinya dengan perlindungan anak. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 5(1), 93–104.
- Amin, M. N. K. A., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode interpretasi hukum: Aplikasi dalam hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36.
- Andriyani, A., & Antasari, R. R. (2019). Kajian teori eksistensi status hukum transeksual terhadap perubahan jenis kelamin pasca penetapan pengadilan. *Muamalah*, 5(1), 15–30.
- Angel, R. B., & Hadiati, M. (2023). Pertimbangan hakim terhadap kepentingan anak dalam mengabulkan dispensasi perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *Review UNES*, 6(1), 3680. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Anggoro, T. (2024). Mengembalikan supremasi Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan upaya hukum kasasi atas putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1). Retrieved January 8, 2025, from <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1579>
- Anindya, A. (2018). Krisis maskulinitas dalam pembentukan identitas gender pada aktivitas komunikasi. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 2(1), 24.
- Anshari, M. R., Erlina, & Hanifah, L. (2022). Pengaturan terhadap perubahan status jenis kelamin di Indonesia. *Borneo Law Review*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.32801/balrev.v4i1.34>

- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361–384.
- Ardianto, S. (2024). Pertanggungjawaban hukum dokter terhadap pasien di instalasi kamar bedah. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(3), 41–56. <https://doi.org/10.62383/majelis.v1i3.24>
- Artaria, M. D. (2016). Dasar biologis variasi jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual. *Jurnal BioKultur*, 5(2), 157-165.
- Asmawati, R., Kelik Wardiono, S. H., & Septarina Budiwati, S. H. (2013). *Hukum dan Pergantian Kelamin: Studi Tentang Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Astutik, Y., & Nugraheni, A. S. C. (2020). Penggantian kelamin bagi transeksual dan akibat hukumnya terhadap keabsahan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 331–340.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Bayu, H., & Windarta, J. (2021). Tinjauan kebijakan dan regulasi pengembangan PLTS di Indonesia. *Jurnal Energi Baru Dan Terbarukan*, 2(3), 123-132
- Benyal, H. S. (2020). Transformasi kewenangan DPD dalam *ius constitutum* ke arah *ius constituendum* demi kesetaraan dalam bikameral. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 77–92.
- Bisma, P. A. S., Saravistha, D. B., & Putri, N. L. K. D. Y. (2023). Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi:(Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/Pt Dps). *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(2), 37-42

- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49.
- Brahmana, R. P., & Karo, R. K. (2022). Penerapan Telemidisin Di Indonesia Berbasis Nilai Teori Keadilan Bermartabat: Pengaturan dan Peran Dokter. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 224-235
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori keadilan menurut Jhon Rawls. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 7(1). Retrieved January 8, 2025, from <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/4017>
- Clara, N. T. (2017). *Interaksi Simbolik Di Komunitas LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) Suara Kita* (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi).
- Damanuri, A. (2012). Muslim diaspora dalam isu identitas, gender, dan terorisme. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 232–251.
- Delviero, J., Zarqa, F. D., Saputra, M. A. Y., & Wijaya, M. K. A. (2023). Eksistensi regulasi kekerasan berbasis gender online ditinjau berdasarkan perspektif *ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 399–408.
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius constituendum*, 5(2), 303–324
- Dewi, D. R. C. (2017). Inconsistency norm (norma hukum yang tidak konsisten) dalam peraturan perkawinan beda agama: Studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Master's thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Retrieved January 8, 2025, from <http://etheses.uin-malang.ac.id/11315/>
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal dinamika hukum*, 11(3), 522-531.
- Erawantini, F., Agustina, E. A., Nuraini, N., & Dewi, R. D. C. (2022). Faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis rawat inap di

- rumah sakit. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 10(1), 94–103. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v10i1.403>
- Evelina, R., & Fitriasih, S. (2024). Sex reassignment surgery (*transgender*) in Indonesia examined from the perspective of criminal law. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2), 01–22.
- Fatimatuzzahro, U., Andriani, Y. N. H., & Zalsabilla, G. L. (2023). Analisis hukum pembagian waris anak yang berganti jenis kelamin berdasar perspektif hukum perdata dan Islam. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, 2(1), 30–41.
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut john rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30-45
- Fauzi, A. (2024). Hukum transeksual di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1230/Pdt.P/2019/Pnjkt.Sel) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/77830>
- Firdaus, M. R., Maula, M. S., & Alfarisi, M. F. (2018). Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No. 15/PDT. P/2015/PN. SMD). *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 31-45.
- Flora, H. S., & Suhardin, Y. (2023). Indonesian culture in the new criminal code: From *ius constituendum* to *ius constitutum*. *Syiah Kuala Law Journal*, 7(2), 157–170
- Gibtiah, G. (2014). Studi Perbandingan tentang Khunsa dengan Transseksual dan *Transgender* (Telaah Pemikiran Ulama'Klasik Dan Ulama'Modern). *Intizar*, 20(2), 349-362
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Hanif, M. F., Thaib, H. M. H., & Azwar, T. K. D. (2023). Analisis yuridis mengenai perubahan gender terhadap kedudukan transeksual sebagai ahli waris

- menurut hukum kewarisan Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 1(2), 94–114.
- Hapsari, V., & Hidayat, R. E. (2023). Implikasi hukum pada transeksual terhadap pembagian waris perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 164–175.
- Hariyanto, D. R. S., & Yogantara, P. S. (2019). Mediasi penal dalam *ius constitutum* dan *ius contituendum* di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 13(1), 26–37.
- Haryono, H. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20–39.
- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan kekerasan berbasis gender online: Perspektif *ius constitutum* dan *ius constituendum* (The legal policy of online gender-based violence regulation: *Ius constitutum* and *ius constituendum* perspective). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 59–79.
- Hilal, A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap penggantian jenis kelamin dalam perspektif hak asasi manusia (Studi putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 1/Pdt.P/2021/Pn Kbm). Skripsi. Universitas Lampung: Fakultas Hukum. from <http://digilib.unila.ac.id/70598/>
- Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisia*, 14(2), 191–203.
- Ikhsan, V., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Tinjauan terhadap aturan hukum penggantian status jenis kelamin di kawasan Asia Tenggara (Studi kasus negara Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 913–924.
- Irfani, N. (2020). Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325



- Irsyad, M. (2021). Hukum Dan Penyelesaian Konflik Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 389-395
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56
- Iswantoro, W. (2018). Penemuan hukum oleh hakim dan implikasi terhadap perkembangan praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 1, 45.
- Januartha, I. M. D., Suwitra, I. M., & Puspasutri Ujianti, N. M. (2023). Keberadaan asas ius curia novit dalam perkara perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 268–274.
- Jemarut, W., Andriani, I. G. A., & Pahrur Riza. (2023). Penetapan Upah Minimum dalam Perpektif Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 133–144.
- Juanda, E. (2017). Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 168–180.
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 717–731. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf>
- Karim, M. T., Pasamai, S., & Kadir, H. (2021). Akibat Hukum Keputusan Perubahan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Dalam Perspektif Waris Islam. Hal. 2. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 798-813.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 21–36. Kholifah. (2020). Kepastian hukum dari penetapan pengadilan tentang perubahan status jenis kelamin (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Khuza'i, M. (2013). Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 11(1), 102-118.
- Kosho, P. P., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2021). Perlindungan Hukum Bagi *Transgender* Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 609-617.
- Koswara, W. (2022). Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(2), 86-103.
- Kurniawati, M., Widanarti, H., & Aminah. (2017). Tinjauan yuridis status keperdataan pelaku transeksual (Studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 518/Pdt.P/2013/PN.Ung). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-19.
- Kusmiati, N. I. (2016). Undue influence sebagai faktor penyebab cacat kehendak diluar KUHPperdata, dalam upaya mengisi kekosongan hukum. *Litigasi*, 17(1), from <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/97>
- Latifa, J. L. (2019). Pertimbangan Hukum Pergantian Kelamin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 517/PDT. P/2012/PN. YK dan Penetapan Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/PDT. P/2015/Pn. Byl). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 8(1).
- Latifa, J. L. (2023). Pertimbangan hukum pergantian kelamin. *Journal on Education*, 5(4), 11707-11719. <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Latuny, J. A., Salmon, H., & Mustamu, J. (2024). Interpretasi hukum mutatis mutandis dalam pembentukan peraturan daerah. *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 100-115.
- Latuny, J. A., Salmon, H., & Mustamu, J. (2024). Interpretasi hukum mutatis mutandis dalam pembentukan peraturan daerah. *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 100-115.

- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Yasid, M. (2023). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 177-191..
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789.
- Maesaroh, N. Y. (2016). Implikasi hukum perkawinan beda agama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 6(1). from <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/mjn/article/view/485>
- Maharani, A. E. P., Pakerti, R. F., & Ginting, R. A. V. (2022). *Transgender: Antara kebebasan dan Norma Agama. Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01).
- Meriam Omar Din, 2000, Kajian Kes Kaunseling Seksualiti:Masalah Seorang Dewasa Transeksual, *Jurnal Perkama*, 8, 153-173
- Mitendra, H. M. (2018). Fenomena dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Muhajirin, M. (2014). *Implikasi putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2531 tahun 1988 tentang operasi ganti kelamin Dedi Yuliyardi alias Dorce Ashadi terhadap kedudukan waris* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

- Mukhid, A. (2018). Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, *Transgender* (Lgbt) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir*, 1(1), 53-75
- Mulyana, S. P., Akwila, K. F., Ummah, L. M. K., & Triswati, F. (2019). Analisis waria atau transgender melakukan operasi ganti kelamin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 18(2), 419834.
- Mustikasari, F. (2024). Analisis peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial: Studi kasus negara Indonesia dalam konteks dinamika politik kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3)
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan hukum & percepatan perkembangan masyarakat. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5(2), 172–183.
- Newin, O. M. (2020). Analisis yuridis pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemohon ganti kelamin (Studi kasus Penetapan Nomor. 87/Pdt P/2016/PN Skt). *Jurnal Fatwa Hukum*, 3(1).
- Novemza, L. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Pergantian Jenis Kelamin. *Jurnal Verstek*, 8(3)
- Nugroho, Y. H., Indarti, E., & Indreswari, T. L. (2018). Pertimbangan Hukum Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Suatu Telaah Paradigmatik. *Diponegoro Law Journal*, 7(2), 198-218.
- Pandit, I. G. S. (2016). Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 14-20.

- Perwira, I. N. S., Widiati, I. A. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perubahan status jenis kelamin dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 74–78. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3095.74-78>
- Pujiastuti, T. (2014). Peran orang tua dalam pembentukan identitas gender anak. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 14(1), 53-62
- Putra, I. B. A. P. (2023). Legalitas perubahan status jenis kelamin menurut perspektif hukum positif di Indonesia. from <https://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/5441/>
- Putri, D. W. D. (2022). LGBT dalam kajian hak asasi manusia di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 88–100.
- Putri, N. U., Wijaya, S., Nur, A. I., & Evingrum, S. (2022, August). Kepastian Hukum bagi *Transgender* di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*
- Rajagukguk, E. (2021). Hakim Indonesia mengesahkan penggantian dan penyempurnaan kelamin. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 1(1), 42–48.
- Ratna, D. (2022). Inconsistency norm peraturan perkawinan beda agama (studi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan): Inconsistency norm in interfaith regulation (study on law No. 1 of 1974 concerning marriage and law No. 23 of 2006 concerning population administration). *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1), 1–16.
- Ridwan, Haq, H. S., & Jiwantara, F. A. (2023). Konsep standar pelayanan publik berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan administrasi kependudukan. *Empiricism Journal*, 4(2), 365–387. <https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism>
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278–298.

- Ristiawati, R. (2020). Kebebasan hakim dalam penegakan hukum ditinjau dari perspektif hukum Islam. *BaLRev*, 2(1), 62–92. <http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev>
- Riswandie, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas “Equality Before The Law”. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 298-310.
- Rohmah, M., & Afifah, W. (2023). Hak atas kesetaraan dan anti-diskriminasi kelompok identitas gender netral (non-binary) dalam hukum positif Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 298–312.
- Romadhon. (2019). Intellectual awareness in judex juris contradiction against the irregularity of *ius constitutum* and *ius constituendum*. *Journal of Public Administration, Finance and Law*(16), 129–137.
- Rosalina, M., Danialsyah, D., Ritonga, Y. C., & Naufal, M. D. (2023). Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (Jurpamm)*, 3(1), 47-52.
- Saefulloh, M., Eko, P., & Muhibbin, M. (2024). *Ratio Decidendi in the Decision of State Administrative Case*. 04(05), 1–5.
- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 20–41.
- Sajidah, H., & Rasyid, A. (2024). Resistensi dan negosiasi identitas gender non-biner di TikTok: Studi kritis tentang representasi dan konstruksi identitas di Indonesia. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 9(1), 52–61.
- Salsabila, C. A. K., Al-Imron, M. D. S., SP, R. R., & Hastriani, S. (2022). Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Saputri, S. T. (2019). *Analisis Perbedaan Entrepreneur Self Efficacy Ditinjau Dari Jenis Kelamin* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik), *Saputri: Psikosains: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi*, 56-68.

- Sarvasti, D. (2020). Pengaruh gender dan manifestasi kardiovaskular pada COVID-19. *Indonesian Journal of Cardiology*, 41(2), 126-32.
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 139-155.
- Sharifuddin, N. M., Ramli, M. A., & Jamil, A. N. (2023). Gender Identity Disorder: Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Pembentukan Identiti Jantina. *Jurnal'ulwan*, 8(3), 108-123.
- Silalahi, W. (2020). Penataan regulasi berkualitas dalam rangka terjaminnya supremasi hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 56-66.
- Singadimedja, H. N. (2019). Identitas baru transeksual dan status hukum perkawinannya. *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(1), 13–30.
- Siregar, M. H., & Muharam, S. (2022). Penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara*, 4(2), 104–118.
- Siregar, R. (2016). Kedudukan hukum terhadap status perubahan jenis kelamin dalam perspektif hak asasi manusia dan administrasi kependudukan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(2), 41–51.
- Sulistiyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. *Jurnal Ius constituendum*, 6(2), 482-496.
- Sunarto, S. (2016). Asas legalitas dalam penegakan hukum menuju terwujudnya keadilan substantif. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(4), 252–258.
- Sunarya, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khuntsa) Berdasarkan Penetapan No. 17/Pdt. P/2015/Pn. Kbm. *Jurnal Notarius*, 2(1).
- Surahman, E. (2023). Status hukum transeksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan relevansinya dengan

Fatwa MUI Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan penyempurnaan alat kelamin.

Sutiyoso, B. (2010). Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 217–232.

Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan Sosial di dalam Negara Hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28-38.

Takdir, M. (2018). Transformasi kesetaraan buruh: Studi kritis teori keadilan John Rawls. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 327–352.

Tampubolon, F. A. W., Wirhartati, D. S., & Nadiva. (2023). Pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemilihan keadilan substantif sebagai putusan akhir sengketa Nomor 39/G/2016/PTUN-BNA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 722–734.

Tan, W., Rusdiana, S., & Simanjuntak, E. N. S. (2023). Konstruksi pertimbangan hakim: Pengakuan identitas jenis kelamin seorang transgender dalam fase sintonik. *Nagari Law Review*, 7(2), 199–211.

Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41–63.

Triyanto, A. N., Idrus, W. A., & Kamba, S. N. M. (2023). Perubahan dan penambahan nama seseorang dan akibat hukum yang didapatkan. *Journal of Comprehensive Science*, 2(5), 1169. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/download/333/324/1257>

Triyudiana, A., Solehudin, A., Fathama, A., & Aryani, N. P. (2022). Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(01).

Triyudiana, A., & Neneng, P. (2024). Penerapan prinsip keadilan sebagai fairness menurut John Rawls di Indonesia sebagai perwujudan dari Pancasila. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1).



- Wahidin, E. (2020). Menata penegakan hukum pemilu sebagai *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* dalam mewujudkan pemilihan umum yang berkeadilan. *Jurnal Thengkyang*, 5(1), 57–66.
- Wahono, E., & Prawesthi, W. (2023). Ratio Decidendi in Determining Tools of Evidence Instructions for Settlement of Criminal Cases in the Murder Trial. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (Polri)*, 2(4), 339–348.
- Weruin, U. U., Andayani, D. B., & Atalim, S. (2016). Hermeneutika hukum: Prinsip dan kaidah interpretasi hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 95–123.
- Wicaksana, Y. P. (2018). Implementasi asas *ius curia novit* dalam penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka. *Lex Renaissance*, 3(1), 3.
- Wijaya, G. (2020). Pelindungan data pribadi di Indonesia: *Ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Law Review*, 19(3), 326–361.
- Yuanita, A. C. (2022). Menelaah konsep keadilan hukum teori keadilan John Rawls dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2), 130–142.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
- Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Nomor 124 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958)

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendataran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 2014).

#### D. Lain-Lain

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Pwt

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus Nomor  
402/Pdt.P/2024/PN Jkt,Brt

*E-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia “*Registrasi Perkara*” [e Court Mahkamah Agung RI Electronics Justice System](#). Diakses pada 13 Juni 2024, 16.42 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. Diakses pada 28 September 2024 Pukul 11.00 WIB

M. Prawiro, “*Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi,*” Maxmanroe, 2018, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>. Diakses pada 22 September 2024 Pukul 17.00 WIB

Komario B, & Desi, P. “*Viralnya Foto KTP M. Fatah dan Klarifikasi Lucinta Luna Soal Sayembara Rp 1 M*”. <https://hot.detik.com/celeb/d-3934093/viralnya-foto-ktp-m-fatah-dan-klarifikasi-lucinta-soal-sayembara-rp-1-m>. Diakses pada 17 Februari 2025 Pukul 15.30. 2018.

NHS “*Overview Gender Dysphoria*”, 2020. [https://www.nhs.uk/conditions/gender-dysphoria/https://www-nhs-uk.translate.google.com/conditions/gender-dysphoria/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=rq#:~:text=Disforia%20gender%20adalah%20istilah%20yang,kelamin%20biologis%20dan%20identitas%20gendernya](https://www.nhs.uk/conditions/gender-dysphoria/https://www-nhs-uk.translate.google.com/conditions/gender-dysphoria/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq#:~:text=Disforia%20gender%20adalah%20istilah%20yang,kelamin%20biologis%20dan%20identitas%20gendernya). Diakses Pada 30 September 2024, 21.38 WIB

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus “*Tentang Pengadilan*”. <https://www.pn-jakartabarat.go.id/>. Diakses pada 26 Juni 2024, 18.00 WIB

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung "*Ratio Desidendi Seorang Hakim*",  
<https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>. Diakses pada 27 September 2024, 01.02 WIB

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat "*Informasi Perkara, Court Calender*". [https://www.sipp.pn.jakartabarot.go.id/list\\_perkara/search](https://www.sipp.pn.jakartabarot.go.id/list_perkara/search). Diakses pada 27 Juni 2024, 20.58 WIB

Hukumonline. (2022, October 4). Visum et repertum sebagai alat bukti. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/visum-et-repertum-sebagai-alat-bukti-lt633c4c5a29ede/>

Hukumonline. (n.d.). *Ius constitutum* dan *ius constituendum*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-constitutum-dan-ius-constituendum-lt56777c031ec1c/>

Hukumonline. (n.d.). Makna asas equality before the law dan contohnya. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfba/>

Hukumonline. (n.d.). Prosedur hukum ganti jenis kelamin. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-hukum-ganti-jenis-kelamin-lt5499758a512e5/>